

Pengembangan Kapasitas Bank Sampah Untuk Mereduksi Sampah Di Kota Tanjungpinang

Mawarni Hani

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
mawarnihani@gmail.com

Dian Prima Safitri

Dosen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
dianprima2000@gmail.com

ABSTRAK

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan penambahan jumlah penduduk mengakibatkan semakin banyaknya sampah yang dihasilkan yang bersumber dari sumber timbulan sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan, dan lain sebagainya. Pemerintah Kota Tanjungpinang terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan dan melakukan upaya untuk menekan volume sampah dengan adanya pengembangan kapasitas bank sampah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas bank sampah untuk mereduksi sampah di Kota Tanjungpinang. Informan penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, dan pengurus bank sampah. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1) belum adanya sistem rekrutmen pegawai yang tepat didalam pengembangan sumber daya manusia. 2) dimensi penguatan organisasi, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan pegadaian, sebagai inovasi dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menabung. 3) dimensi reformasi kelembagaan melalui Peraturan Walikota No 43 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga harus mencapai target 100% sampah yang terkelola ditahun 2025 diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas bank sampah untuk mereduksi sampah di Kota Tanjungpinang sudah optimal, meskipun belum berjalan begitu sempurna. Saran peneliti yaitu pemerintah diharapkan mendorong berdirinya bank sampah di setiap kelurahan dan kecamatan sehingga sampah di Kota Tanjungpinang bisa direduksi.

Kata Kunci: *Bank Sampah, Pengembangan Kapasitas*

I. Pendahuluan

Penelitian ini ingin mengkaji pengembangan kapasitas bank sampah untuk mereduksi sampah di Kota Tanjungpinang. Lajunya pertumbuhan penduduk di kota Tanjungpinang, mengakibatkan banyaknya aktifitas yang terjadi di Kota Tanjungpinang. Aktifitas yang dilakukan oleh penduduk atau masyarakat Kota Tanjungpinang akan berdampak kepada kebersihan lingkungan kota. Hasil dari aktifitas masyarakat ini adalah semakin banyak sampah-sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang habis pakai atau bahan-bahan yang tidak di pergunakan lagi yang bersumber dari sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan.

Bank sampah di Kota Tanjungpinang berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengolahan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan nilai ekonomi. Bank sampah juga merupakan salah satu indikator dalam penilaian adipura setiap tahunnya. Berikut ini alasan mengapa diperlukan bank sampah dalam pengelolaan sampah:

1. Indonesia telah memiliki undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bank sampah salah satu sistem yang mengimplementasikan undang-undang dimaksud dalam mengelola sampah yang dimulai dari sumbernya
2. Jumlah sampah yang diangkut ke TPA terus meningkat.
3. Kebiasaan masyarakat membakar dan membuang sampah sembarangan terus berjalan.
4. Sebagian masyarakat masih berprasangka buruk terhadap profesi penggiat sampah (pemulung).
5. Belum dilibatkannya peran pembeli sampah (pengepul) secara optimal oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah.
6. Sampah selama ini belum menjadi media pendidikan yang optimal bagi anak-anak.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, bank sampah kota Tanjungpinang berada di beberapa tempat yaitu:

Tabel 1 Daftar Nama Bank Sampah

No	Nama	Alamat	SK	No SK	Tanggal SK
1.	Bank Sampah Induk, Bank Sampah Amad Potong Lembu	Kel.Kamboja Kec.Tanjungpinang Barat	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	No.08 Tahun 2017	07 Maret 2017
2.	Bank Sampah Amad Potong Lembu	Kel.Kamboja Kec.Tanjungpinang Barat	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	No.08 Tahun 2016	12 Februari 2016
3.	Bank Sampah Cermai	Kel.Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	Nomor 14 Tahun 2015	17 April 2015
4.	Bank Sampah Dahlia (tidak aktif)	Kel.Tanjung Unggat Kec.Bukit Bestari	Lurah Tanjung Unggat	Nomor 23 Tahun 2013	12 April 2013
5.	Bank Sampah Gurindam Seraya (tidak aktif)	Kel.Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur	Lurah Air Raja	Nomor 15 Tahun 2015	01 April 2015
6.	Bank Sampah Kalpataru	Jl.D.I Panjaitan Km.10 Kota Tanjungpinang	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	Nomor 26 Tahun 2016	19 September 2016

7.	Bank Sampah SD 008	Jl.R.E Martadinata Km.6 Tanjungpinang	Kepala SDN 008 Tanjungpinang Timur	Nomor 421.2/024 /5.5.2.2.2.08/2018	03 Januari 2017
8.	Bank Sampah Semesta Tanjungpinang	Kel.Pinang Kencana Kec.Tanjungpinang Timur	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	Nomor 24 Tahun 2016	09 Mei 2016
9.	Bank Sampah SMKN 1	Jl.Pramuka No.6 Kota Tanjungpinang	Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Tanjungpinang	Nomor 442.23/08 3a/5.5.3.2.01/2014	10 Februari 2015
10.	Bank Sampah Mitra Bahagia Sejahtera (MBS)	Kel.Pinang Kencana Kec.Tanjungpinang Timur	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	Nomor 48 Tahun 2018	10 September 2018
11.	Bank Sampah SMPN 7 Tanjungpinang	Kel.batu Sembilan Kec.Tanjungpinang Timur	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	Nomor 41 Tahun 2016	01 November 2016
12.	Bank Sampah Kita Maju Bersama (pasif)	Kel.Bukit Cermin Kec.Tanjungpinang Barat	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	Nomor 14 Tahun 2019	06 Februari 2019
13.	Bank Sampah Tanjung Unggat Berseri (pasif)	Kel.Tanjung Unggat Bukit Bestari	Kepala Dinas Lingkungan Hidup KotaTanjungpinang	Nomor 60 Tahun 2018	10 Desember 2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang,2019

Dari tabel diatas peneliti hanya fokus dengan beberapa bank sampah yaitu bank sampah induk Amad Potong Lembu berada di Jalan Potong Lembu

Kemboja, bank sampah KSM Cermai berada di Sei Jang, gang Sei Jang 4, Kel. Sei. Jang Kecamatan Bukit Bestari, RT/RW 01/04 Kota Tanjungpinang, Bank sampah Semesta berada di Kelurahan Pinang Kencana, Bank sampah Mitra Bahagia Sejahtera berada di Jl. Hang Lekir, di ruko Hang Lekir, batu IX, Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, bank sampah Kita Maju Bersama, bank sampah tanjung unggat berseri, bank sampah Kita Maju Bersama, bank sampah tanjung unggat berseri, bank sampah kalpataru.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup, Sri Herlinda mengatakan bahwa bank sampah sekolah di skip, karena pola berfikir bank sampah sekolah itu berbeda dan masuk ke kelompok sekolah adiwiyata. Selain itu, bank sampah sekolah juga bukan semi komersil, bank sampah sekolah untuk mengedukasi bukan melihat dari berapa banyak uang yang didapat, tidak juga melihat harga, mereka hanya melihat volume sebagai edukasinya.

Dalam rangka untuk mereduksi sampah di Kota Tanjungpinang maka langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan kapasitas pada unit-unit bank sampah yang ada di Kota Tanjungpinang. Menurut Grindel pengembangan kapasitas didefinisikan sebagai "serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian pada dimensi sumber daya manusia, penguatan organisasi, reformasi kelembagaan atau lingkungan (dalam Keban 2012:46)

Diperlukan pelatihan, sosialisasi dan edukasi sebagai proses pengembangan ketenagakerjaan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan personil, termasuk didalamnya peningkatan kemampuan menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pelatihan dan pengembangan SDM sangat erat hubungannya dengan hasil kinerja SDM tersebut. Pelatihan dan pengembangan SDM yang tepat, dapat memberikan efek yang baik kepada pengelola bank sampah.

Tantangan kelembagaan bank sampah diantaranya adalah bagaimana menciptakan perencanaan yang baik, pengorganisasian, koordinasi, komunikasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan *stakeholders*, terutama pada pengelola dan pihak pemerintah maupun pihak mitra. Dalam

struktur organisasi kepengurusan bank sampah yang ada di Kota Tanjungpinang di SK kan oleh Badan Lingkungan Hidup (sekarang Dinas Lingkungan Hidup). Masing-masing bank sampah yang menentukan pengelola sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pada tahun 2017 pemerintah kota Tanjung pinang menargetkan bebas sampah di tahun 2025 melalui Peraturan Walikota No 43 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga harus mencapai target 100% sampah yang terkelola dengan baik dan benar pada tahun (2025), diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampah sampai ketempat pemrosesan akhir (TPA) dan akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Didalam mencapai hal tersebut Pemko Tanjungpinang terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan dan melakukan upaya untuk mereduksi sampah dengan adanya pengembangan kapasitas bank sampah pada unit-unit bank sampah yang ada di Kota Tanjungpinang.

Dapat kita ketahui bahwa tujuan sebenarnya pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan suatu organisasi untuk meningkatkan daya tanggap individu, organisasi atau sistem terhadap perubahan lingkungan sehingga mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan zaman. Upaya tersebut dibangun dari potensi yang sudah ada kemudian diproses agar lebih meningkatkan kualitas individu, organisasi, serta sistem agar dapat bertahan ditengah perubahan lingkungan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas bank sampah untuk mereduksi sampah di Kota Tanjungpinang dengan memusatkan perhatian pada teori pengembangan kapasitas yang dikemukakan oleh Grindle dalam Keban,dkk (2012:46) melalui dimensi pengembangan sumber daya manusia, dimensi penguatan organisasi, dimensi reformasi kelambagaan.

II. Tinjauan Pustaka

Secara umum konsep pengembangan kapasitas dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok, atau organisasi.

pengembangan kapasitas dapat diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok, atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.

Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle dalam Keban,dkk (2012:46) adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Dimensi Pengembangan Kapasitas

<i>Dimensions</i>	<i>Focus</i>	<i>Type Of Activies</i>
<i>Human Resource</i> (pengembangan SDM).	<i>Supply of profesional and technical personel</i> (kesediaan tenaga teknis dan profesional).	<i>Training, salaries, conditions of work, recruitment</i> (pelatihan, gaji, kondisi kerja dan rekrutmen).
<i>Organizational strengthening</i> (penguatan organisasi).	<i>Institusions system to improve performance of spwcific taks and functions; and microstructures</i> (sistem manajemen dalam mengembangkan performasi tugas-tugas khusus dan fungsi; struktur mikro).	<i>Incentive system, utilizationnof personel, leadership,organizational culture, communications, manajerial structures</i> (sistem insentif, pemanfaatan personil,kepemimpinan,bud aya organisasi, komunikasi dan struktur manajerial).
<i>Institutional reform</i> (reformasi kelembagaan)	<i>Institusions and system,macrostructures</i> (lembaga dan sistem;struktur makro)	<i>Rules of the game for economic and politicalregimes, policy and legal change, system reform</i> (aturan permainan untuk rezim politik dan perubahan

		kebijakan, reformasi sistem)
--	--	------------------------------

Sumber: Grindle dalam Keban, dkk (2012:46)

Dari tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dimensi pengembangan kapasitas meliputi: 1) dimensi pengembangan sumber daya manusia dengan fokus pada kesediaan tenaga teknis dan profesional, sedangkan aktivitasnya meliputi, pelatihan, gaji, kondisi kerja dan rekrutmen. 2) dimensi penguatan organisasi, dengan fokus pada sistem manajemen dalam mengembangkan performasi tugas-tugas khusus dan fungsi; struktur mikro; sedangkan jenis aktivitasnya meliputi, sistem intensif, pemanfaatan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi dan struktur *manajerial*. 3) dimensi reformasi kelembagaan dengan fokus lembaga dan sistem; struktur makro, sedangkan jenis aktivitasnya meliputi, aturan permainan untuk rezim politik dan perubahan kebijakan, reformasi sistem.

Setelah diuraikan beberapa dimensi yang ada dalam pengembangan kapasitas yang terdiri dari dimensi pengembangan sumber daya manusia, dimensi penguatan organisasi, dan dimensi reformasi kelembagaan. Maka ketiganya diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas. Secara khusus menurut (Riyadi, 2003) dalam sebuah artikel secara khusus menyampaikan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi *capacity building* meliputi 4 hal pokok yaitu:

- 1) *Komitmen bersama*. Komitmen bersama dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi sangat menentukan sejauh mana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuh kembangkan dan dipelihara secara baik oleh karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi.
- 2) *Kepemimpinan*. Faktor *conducive leadership* merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pengembangan kapasitas personal dalam kelembagaan

sebuah organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi publik, harus terus menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Kepemimpinan kondusif yang memberikan kesempatan luas pada setiap elemen organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas merupakan sebuah modal dasar dalam menentukan efektivitas kapasitas kelembagaan menuju realisasi tujuan organisasi yang diinginkan.

- 3) *Reformasi Peraturan*. Kontekstualitas politik pemerintahan daerah di Indonesia serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal-formal prosedural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itulah, sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi (atau dapat dibaca penyelenggaraan peraturan yang kondusif) merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini.
- 4) *Reformasi kelembagaan*. Reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan ini. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas karena pengembangan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia (*existing capacities*).

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa

kata-kata lisan ataupun tulisan dari informan yang diteliti. Metode penelitian ini dipilih yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan dampak sosial. Penelitian ini ingin menggali data dan informasi tentang pengembangan kapasitas bank sampah untuk mereduksi sampah di Kota Tanjungpinang.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, dan beberapa unit Bank sampah yang ada di kota Tanjungpinang. Hal ini dilakukan guna mempermudah peneliti dalam mendapatkan sejumlah data yang diperlukan.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengadaan dan Pengendalian Pengangkutan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, serta pengelola/pengurus bank sampah yang ada di Kota Tanjungpinang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara pada informan dan lokus yang telah ditentukan, semua hasil yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai pustaka seperti Undang-undang Republik Indonesia, peraturan-peraturan yang terkait, buku-buku, tulisan-tulisan penelitian, studi kasus, ataupun artikel dan jurnal yang diterbitkan.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil, (Sugiyono, 2013:137). Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait bank sampah yang ada di kota Tanjungpinang melalui informan-informan dalam penelitian. Wawancara terhadap informan dipandu dengan pedoman interview berstandar dalam bentuk pertanyaan. Keterangan waktu wawancara bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi.

IV. Pembahasan

Untuk menjawab penelitian peneliti menggunakan model pengembangan kapasitas menurut Grindle dalam Keban,dkk (2012:46). Model ini dipilih karena variabel-variabel dari model pengembangan kapasitas ini dapat menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana pengembangan kapasitas bank sampah untuk mereduksi sampah di Kota Tanjungpinang. Adapun variabel-variabel dari model pengembangan kapasitas ini adalah pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pengembangan kapasitas bank sampah Kota Tanjungpinang yang difokuskan pada tingkatan individu/Sumber Daya Manusia (SDM) adalah melalui sistem rekrutmen yang tepat, pelatihan, gaji, dan kondisi kerja. Pengembangan kemampuan SDM ini harus menjadi prioritas pertama oleh sebuah organisasi, karena SDM yang berkualitas prima akan mampu mendorong terbentuknya kemampuan faktor non-manusia secara optimal.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengadaan rekrutmen,seleksi,belum terlaksana dengan baik untuk pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang bergabung dalam program bank sampah. Dalam memilih SDM masih menggunakan tingkatan individual, yaitu siapa yang bersedia menjadi pengurus tanpa adanya proses rekrutmen. Pada tingkatan individual ini secara umum dilakukan dengan pelatihan, dan sosialisasi yang merupakan suatu keharusan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia untuk menjawab berbagai persoalan dalam lingkup sumber daya manusia yang kompeten. Pelatihan dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun pengelola bank sampah yang bekerja sama dengan pihak RT/RW kelurahan setempat.

Pelatihan dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun pengelola bank sampah yang bekerja sama dengan pihak RT/RW kelurahan setempat. Pada tahun 2019 pelatihan yang pernah dilakukan oleh pemerintah provinsi yaitu pelatihan daur ulang yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan

provinsi Kepri di lakukan di Batam, dengan tema memanfaatkan limbah plastik dari *sachet*.

Pengembangan kemampuan SDM ini harus menjadi prioritas pertama oleh sebuah organisasi, karena SDM yang berkualitas prima akan mampu mendorong terbentuknya kemampuan faktor non-manusia secara optimal. Dengan kata lain, kemampuan suatu daerah secara komprehensif tidak hanya tercermin dari kapasitas SDM-nya saja, namun juga kapasitas yang bukan berupa faktor manusia (*non-human capacity*), misalnya kemampuan keuangan dan sarana /prasarana atau infrastruktur. Dengan itu adanya *recruitment* yang tepat, dengan tujuan untuk memperoleh SDM sesuai klasifikasi kebutuhan organisasi dalam pembaharuan dan pengembangan. Sesuai dengan pendapat dari Rivai Sagala (2008:147) mengatakan bahwa rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan.

b. Penguatan Oraganisasi

Pengembangan kapasitas bank sampah Kota Tanjungpinang yang difokuskan pada tingkatan organisasi melalui pemanfaatan personil ,komunikasi, kepemimpinan, sistem insentif. Penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing.

Struktur organisasi Bank sampah yang ada di Kota Tanjungpinang semuanya di SK kan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Masing-masing bank sampah yang memilih anggota nya sesuai dengan kedudukan dalam kepengurusan. Anggota melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya sehingga program dapat terlaksana dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Milen (2004) mengemukakan bahwa salah satu penguatan organisasi yaitu memfokuskan proses dan struktur yang dapat mempengaruhi bagaimana organisasi tersebut menetapkan tujuannya dalam menyusun dan menyusun pekerjaannya secara insentif. Struktur organisasi yang baik dan tepat dapat menjawab tantangan perubahan yang dihadapi oleh organisasi.

Fokus perhatian dalam penguatan organisasi menurut Haryono, dkk (2012:47) terletak pada pemanfaatan personil, bagaimana mendesain struktur manajerial dan persoalan pengembangan jaringan-jaringan:

a. Pemanfaatan personel

Salah satu unsur dalam penguatan organisasi adalah pendayagunaan aparatur atau biasa disebut dengan pemanfaatan personel, yaitu menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya atau istilah lainnya *the right man on the right place*. Dengan menerapkan prinsip ini maka akan menciptakan pegawai yang memiliki kompetensi yang tepat atau menciptakan aparatur yang profesional dalam bidangnya. Pada penelitian ini konsep pemanfaatan personil dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh DLH dalam memanfaatkan pengelola bank sampah agar memiliki keprofesionalan bekerja. Misalnya dengan memfokuskan masing-masing bidang yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tujuan dari penerapan prinsip ini adalah menciptakan pengurus yang profesional dalam bidangnya. Haryono,dkk (2012:72) menjelaskan bahwa upaya pemanfaatan personel menjadi penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional yang pada akhirnya mampu melahirkan sumber daya manusia yang mampu menjadi motor penggerak bagi terwujudnya organisasi yang dinamis, inovatif, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan.

b. Aspek manajerial

Aspek manajerial menyangkut bagaimana pengelolaan organisasi menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Prinsip-prinsip manajemen pada umumnya yaitu *planning, organizing, actuating and controlling* (POAC) sehingga pelaksanaan suatu program dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu aspek terpenting yang merupakan bagian dari penguatan organisasi adalah penerapan aspek manajerial, pada penelitian ini dipahami bahwa penerapan aspek manajerial adalah bagaimana pemerintah mampu melakukan inovasi dalam segi pemasaran untuk bank sampah kota Tanjungpinang salah satunya melakukan kerja sama dengan pegadaian.

c. Jejaring kerjasama

Dalam upaya pengembangan jaringan yang merupakan basis dari interaksi sosial dan sah didalam organisasi. Kemampuan membentuk kerja sama antara organisasi, menuntut adanya kemampuan khusus dari organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menunjang jaringan kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Jaringan kerjasama yang dibangun harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, dengan menghindari ketergantungan dan eksploitasi.
2. Jaringan kerjasama harus menjaga berkesinambungan
3. Jaringan kerjasama harus menjaga berkesinambungan kegiatan dalam jangka waktu yang panjang untuk kepentingan bersama.

Kepemimpinan adalah salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan program pengembangan kapasitas individu/personal dalam lembaga. Dalam struktur organisasi pemimpin merupakan orang yang memiliki andil besar dalam upaya membawa bawahannya kearah kemajuan. Kepemimpinan yang kondusif, pemimpin yang peka dan mengetahui kebutuhan akan pengembangan kualitas diri bawahan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengembangan kapasitas. Semakin pemimpin memberikan kepercayaan dan suasana kondusif pada anggota untuk berkembang, maka akan semakin sukseslah program pengembangan kapasitas dalam sebuah organisasi. Partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi pada hakekatnya akan menghasilkan analisis dengan penilaian yang objektif dan pengembangan kapasitas pun dapat dikatakan dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle dalam Rulinawaty (2015) bahwa organisasi akan *survive* apabila penguatan organisasi selalu dipertahankan. Penguatan organisasi lebih berfokus pada sistem organisasi bukan individu. Artinya semakin baik penguatan organisasi maka akan meningkatkan kinerja organisasi.

Kesuksesan dalam organisasi sangat tergantung kepada para anggotanya baik dalam hal hubungan antar individu maupun kelompoknya. Sikap yang sangat urgen dalam pembentukan komunikasi yang solid adalah dengan membangun komunikasi dan saling memberikan kepercayaan. Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan kerja sama dengan pihak pegadaian untuk pengembangan kinerjanya bank sampah, baik dari segi produksi, segi pemasaran, segi SDM dan segi manajemen keuangan. Di sisi keuangan dan sisi pemasaran selama ini bank sampah yang ada di Kota Tanjungpinang hanya mengandalkan di pelapak. Perlu inovasi perlu strategi lain untuk meningkatkan kinerja mereka

salah satunya dengan promosi dengan cara mengubah pola pikir masyarakat bahwa bank sampah bisa dijadikan emas. Padahal prinsip kerjanya tetap sama, sampah dijadikan duit, duit di konversikan ke emas dan yang bisa melaksanakan itu pegadaian.

d. Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan pada intinya menunjukkan kepada iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyesuaikan program kapasitas ini.

Pada sebuah lembaga dikenali tidak hanya sekedar dari tujuannya, aturan mainnya dan bagannya saja. Namun jaringan hubungan informal ikut berpengaruh besar terhadap kegiatan setiap unit lembaga apapun nama dan bentuknya. Apakah itu lembaga bisnis, lembaga sosial, maupun lembaga publik. Yang pasti bahwa hubungan dalam lembaga, baik dalam konteks formal maupun informal, mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang besar dalam menentukan perilaku setiap anggotanya. Oleh karena itu, Sharp dalam Budi Setiyono (2014:141) mengatakan bahwa lembaga adalah merupakan sekumpulan orang yang bekerja di dalamnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Maka dapat disimpulkan bahwa setiap lembaga satu sama lain pastinya berkaitan. Pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang berada dalam dua lingkup dinas yaitu DLH dan Perkim. DLH melakukan pengurangan sedangkan perkim melakukan penanganan. Dari sisa-sisa pengurangan sampah yang tidak bisa diolah lagi dibuang ke TPA, TPS 3R, dan TPS T, menggunakan *amrool truck*, *dump truck* ataupun yang sejenisnya. Pengangkutan sampah yang tidak bisa diolah lagi atau sampah yang sudah tidak bernilai itu tugasnya perkim, karena perkim yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana tersebut.

Terkait Perda kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 dan perda nomor 14 tahun 2009, menimbang bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan

sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah. Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berskala setiap enam bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. Dinas terkait juga menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan. Semakin baik pembaruan institusi akan meningkatkan kinerja organisasi.

Pemerintah daerah harus menyusun dokumen JAKSTRADA (Kebijakan dan Strategi Daerah) dalam kurun waktu 6 bulan untuk pemerintah daerah provinsi dan 1 tahun untuk pemerintahan kabupaten/kota. Dokumen JAKSTRADA (kebijakan dan strategi daerah) yang akan dibuat bukanlah merupakan dokumen normatif dan kualitatif saja, tetapi merupakan dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan daerah masing-masing yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ketempat pemrosesan akhir (TPA) dan akan di laksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Melalui Peraturan Walikota No 43 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, harus mencapai target 100% sampah yang terkelola dengan baik dan benar pada tahun (2025), diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ketempat pemrosesan akhir (TPA) dan akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Melalui program bank sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat pembakaran sampah dan pembuangan sampah sembarangan, dan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Berikut ini tabel target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Tanjungpinang:

Tabel 3 Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Tanjungpinang

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	62.698,77	64.266,24	65.872,89	67.519,72	69.207,71	70.937,90	72.711,35	74.529,13
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kota Tanjungpinang (Ton/Tahun)	11.285,78	12.853,25	14.492,04	16.204,73	17.994,00	19.153,23	20.359,18	22.358,74

Tabel 4 Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Tanjungpinang.

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	62.698,77	64.266,24	65.872,89	67.519,72	69.207,71	70.937,90	72.711,35	74.529,13

Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kota Tanjungpinang (Ton/Tahun)	45.770,10	51.412,99	49.404,67	49.964,59	50.521,63	51.075,29	51.625,06	52.170,39

Sumber: Peraturan Walikota No 43 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga,2019.

Tugas pemerintah adalah mensosialisasikan JAKSTRADA agar masyarakat dan penggiat lingkungan mengetahui isi dari kebijakan tersebut. Dokumen Jakstrada akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah di daerah yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan target indonesia bersih sampah 2025 melalui pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Penetapan ini mempertimbangkan :

- 1) Penyusunan skala prioritas jenis sampah plastik yang perlu ditangani terlebih dahulu,
- 2) Jumlah target pengurangan dan daur ulang sampah plastik didasarkan hasil perhitungan realistik,terukur,dan bertahap
- 3) Prioritas wilayah pengurangan dan daur ulang sampah plastik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Soeprpto (2003) bahwa salah satu faktor pengembangan kapasitas adalah pembaruan sebuah institusi, institusi harus disusun yang mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan dan dilaksanakan secara konsisten sehingga peraturan harus sesuai dengan pengembangan kapasitas kelembagaan.

V. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) melalui dimensi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berjalannya sistem rekrutmen yang tepat. Dalam memilih SDM masih menggunakan tingkatan individual, yaitu menunjuk siapa yang bersedia menjadi pengurus tanpa adanya proses rekrutmen padahal dengan adanya sistem rekrutmen yang tepat mampu mendorong terbentuknya kinerja organisasi bank sampah yang optimal. (2) melalui dimensi Penguatan Organisasi. Pemanfaatan personil sudah berjalan dengan baik. Masing-masing bank sampah yang memilih anggotanya sesuai dengan kedudukan dalam kepengurusan. DLH mengeluarkan SK kepengurusan dan sudah melakukan upaya dalam memanfaatkan pengelola bank sampah agar memiliki keprofesionalan bekerja. (3) Melalui dimensi reformasi kelembagaan, dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ketempat pemrosesan akhir (TPA) dan akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Salah satunya dengan program bank sampah yang didirikan, yaitu melalui Peraturan Walikota No 43 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, harus mencapai target 100% sampah yang terkelola dengan baik dan benar pada tahun (2025), diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Akan tetapi kurangnya sosialisasi oleh pemerintah sehingga ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui terkait program Jakstrada ini.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas adapun saran yang peneliti berikan dalam penelitian ini dari peneliti yaitu pemerintah diharapkan mendorong berdirinya bank sampah di setiap kelurahan dan kecamatan sehingga sampah di Kota Tanjungpinang bisa direduksi. Dari penelitian ini ada beberapa saran yang dikeluarkan untuk tujuan penelitian sesuai indikator yang dipakai peneliti yaitu: (1) adanya sistem rekrutmen tenaga kerja bank sampah sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena sumber daya manusia yang berkualitas mampu mendorong terbentuknya kinerja organisasi bank sampah yang optimal. (2) mengoptimalkan kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pegadaian agar minat masyarakat untuk menabung semakin meningkat. (3) mengoptimalkan sosialisasi terkait Peraturan Walikota

No 43 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah (JAKSTRADA) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, agar masyarakat mengetahui apa-apa saja yang terkait dengan program JAKSTRADA.(4) pemerintah diharapkan mendorong berdirinya bank sampah disetiap kelurahan dan kecamatan sehingga sampah di Kota Tanjungpinang bisa direduksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Aboejoewono. 1985. Pengelolaan sampah menuju ke sanitasi lingkungan dan permasalahannya wilayah DKI Jakarta sebagai suatu kasus. Jakarta: alfabeta.
- Kadarisman. 2012. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, PT. Raja Grafindo, Depok.
- Milen, A. 2004. Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas, Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta.
- Notoadmodjo, Soekidjo. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal

- Sahadi Humaedi, Yulinda Adharani, Yushy Kurnia Herliani. "Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Secara Mandiri dan Pemetaan Sosial." Jurnal Penelitian & PMM, April 2018: Volume 5, Nomor 1.
- Donna Asteria, Heru Heruman. "Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya." Jurnal Manusia dan Lingkungan, Maret 2016: Volume 23, Nomor 4.
- Reba Anindyati Pratama, Iif Miftahul Ihsan. "Peluang Penguatan Bank Sampah untuk Mengurangi Timbulan Sampah Perkotaan." Jurnal Teknologi Lingkungan. Januari 2017: Volume 18, Nomor 1.
- Isti Surjandari, Ahmad Hidayatno, Ade Supriatna. "Model Dinamis Pengelolaan Sampah untuk Mengurangi Beban Penumpukan." Jurnal Teknik Industri, Desember 2009 : volume 11, Nomor 2.
- Jenevia Dwi Ratnasari. "pengembangan Kapasitas Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang." Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 2017: Volume 1, Nomor 3.

Peraturan Perundang-undangan

Dokumen Jakstrada Peraturan Walikota No 43 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Perda Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan.

Perda Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pengelolaan Sampah.